

# **PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj-IP ) TAHUN 2017**



### **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**JL. HARAPAN BARU (KOMPLEKS SKPD) BLOK A NO. 8  
PEMKAB SIDRAP**

# **PERJANJIAN KENERJA TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**JL. HARAPAN BARU (KOMPLEKS SKPD) BLOK A NO. 8  
PEMKAB SIDRAP**

# PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)

TAHUN 2017



## **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) BLOK A No.8,  
Pangkajene Sidenreng  
Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan

# PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) BLOK A No.8,  
Pangkajene Sidenreng  
Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan



# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang Kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Sidenreng Rappang bukanlah akhir dari segalanya. LAKIP akan menunjukkan hasil jika capaian yang dihasilkan telah selaras dan bersinergi dengan apa yang dicanangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

LKj-IP akan menunjukkan hasil jika pertanggung jawaban ini dapat diterima oleh stakeholder termasuk masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang padanya umumnya. LKj-IP akan memberikan manfaat jika masyarakat dapat mengerti akan makna yang terkandung didalamnya.

Tujuan Penyusunan LKj-IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui Penyusunan LKj-IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Walaupun masih terdapat kekurangan terutama dalam membangun sistem informasi untuk menilai indikator kinerja, kami akan terus lanjutkan semua tugas yang diamanahkan untuk menggapai visi kedepan.

Kami menyakini bahwa eksistensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tergantung pada bagaimana mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah diamanahkan publik kepada organisasi. Sehingga, penerbitan LKj-IP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang ini, diharapkan akan

memberikan nuansa baru bagi penyelenggaraan aktivitas organisasi, khususnya bagi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2018

**KEPALA DPMDPPA,**

**PATAHANGI NURDIN, S. IP**

Pangkat. Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19691220 199009 1 002

# DAFTAR ISI

<b>Kata pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>IV</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>V</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
a. Menurut Golongan.....	5
b. Menurut Jabatan/Eselon dan staf.....	5
c. Menurut Tingkat Pendidikan.....	6
d. Menurut Jenis Kelamin.....	6
C. Fungsi Strategis.....	9
D. Permasalahan Utama.....	9
E. Maksud dan Tujuan LKj-IP.....	10
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>12</b>
A. Perencanaan Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja.....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017</b> .....	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
1. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi kelembagaan masyarakat.....	<b>16</b>
2. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.....	22
3. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan.....	25
4. Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan.....	30

5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak.....	34
B. Realisasi Anggaran.....	37
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	44
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa mendatang.....	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

1. Tabel Rencana Strategis (RS)
2. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
3. Tabel Rencana Kinerja Tahunan ( RKT) Tahun 2017
4. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap

anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MENPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) untuk tahun anggaran 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 sebagai berikut :

**Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  - 1. Sub.bag Perencanaan
  - 2. Sub.bag Keuangan
  - 3. Sub.bag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Pemerintahan desa
  - 1. Seksi Penataan Desa dan Kelembagaan Pemerintah Desa
  - 2. Seksi Keuangan dan Aset Desa
  - 3. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Desa
- d. Bidang Kelembagaan dan Sosialisasi Budaya Masyarakat
  - 1. Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
  - 2. Seksi Kelembagaan, Adat dan Budaya Masyarakat
  - 3. Seksi Ketahanan Masyarakat
- e. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa
  - 1. Seksi pengembangan Usaha Ekonomi Desa
  - 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
  - 3. Seksi Pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdesaan
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
  - 2. Seksi Perlindungan Anak
  - 3. Seksi Kualitas Keluarga

Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Merumuskan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan;
3. Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Menyusun kegiatan tahunan kantor sesuai kebijakan Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Mengambil langkah-langkah kebijakan operasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pokok badan dapat berjalan;
6. Mengawasi atau mengecek setiap pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan pembinaan agar tugas selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan;
7. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kelancaran tugas;
8. Mengikuti rapat dan pertemuan lainnya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Kepala Dinas;
9. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mencari langkah-langkah pemecahannya;
10. Menilai prestasi dan semangat pengabdian aparat bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan aparat untuk pembinaan karier.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh Aparatur Sipil Negara sejumlah 38 orang ASN dengan rincian sebagai berikut:

**a. Menurut Golongan**

<b>Kepala Dinas</b>	1	-	-	1
<b>Sekretariat</b>	1	8	2	11
<b>Bidang Bina Pemerintahan Desa</b>	1	5	-	6
<b>Bidang Kelembagaan &amp; Sosial Budaya Masyarakat</b>	2	5	-	7
<b>Bidang Pembangunan &amp; Usaha Ekonomi Desa</b>	1	4	1	6
<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</b>	1	3	1	5
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>38</b>

**b. Menurut Jabatan/Eselon dan Staf**

<b>Kepala Dinas</b>	1	-	-	-	1
<b>Sekretariat</b>		1	3	7	11
<b>Bidang Bina Pemerintahan Desa</b>		1	3	2	6
<b>Bidang Kelembagaan &amp; Sosial Budaya Masyarakat</b>		1	2	3	6
<b>Bidang Pembangunan &amp; Usaha Ekonomi Desa</b>		1	2	3	6
<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</b>		1	2	3	6
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>38</b>

**c. Menurut Tingkat Pendidikan**

<b>Kepala Dinas</b>		1	-	-	1
<b>Sekretariat</b>	2	6	-	3	11
<b>Bidang Bina Pemerintahan Desa</b>	1	5	-	-	6
<b>Bidang Kelembagaan &amp; Sosial Budaya Masyarakat</b>	4	3	-	-	7
<b>Bidang Pembangunan &amp; Usaha Ekonomi Desa</b>	2	3	-	1	6
<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</b>	1	4	-	2	7
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>38</b>

**d. Menurut Jenis Kelamin**

<b>Kepala Dinas</b>	1	-	1
<b>Sekretariat</b>	5	6	11
<b>Bidang Bina Pemerintahan Desa</b>	4	2	6
<b>Bidang Kelembagaan &amp; Sosial Budaya Masyarakat</b>	4	3	7
<b>Bidang Pembangunan &amp; Usaha Ekonomi Desa</b>	-	6	6
<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak</b>	1	6	7
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>

Sementara untuk mendukung Tupoksi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh sarana dan prasarana terdiri dari :

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Barang/Jenis Barang</b>	<b>Merk/Type</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Kondisi</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Bangunan Gedung	-	1	Baik
2.	Mobil	Kijang Inova	1	Baik
3.	Motor	Honda Revo/Shogun	6	1 Rusak Berat/5 Baik
4.	Alat Kantor Lainnya	Aluminium	2	Baik
5.	Lemari Kayu		2	Baik
6.	Meja Tambahan		4	Baik
7.	Kursi Rapat		70	2 Kurang Baik/26 Rusak Berat/42 Baik
8.	Kursi Tamu		2	1 Kurang Baik/1 Baik
9.	Kursi Putar	Zeppelin Staff Chair Black	30	Baik
10.	Meja Biro		9	6 Baik/ 3 Rusak Berat
11.	Gordyn		1	Baik
12.	AC Split 2 PK	Panasonic	5	3 Baik/2 rusak berat
13.	AC Split 2 PK	Polytron	2	2 Rusak Berat
	AC Spilit 2 PK	Sharp	1	Rusak Berat
14.	P.C Unit/ Komputer PC	LG	2	1 Rusak Beart/1 Baik
15.	P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo	7	Baik
16.	P.C Unit/ Komputer PC	Komputer PC	2	Baik
17.	Laptop	Asser Aspire	1	1 Kurang Baik
18.	Laptop	Toshiba	2	1 Baik/ 1 Rusak Berat
19.	Laptop		1	Baik
20.	Laptop	HP	2	Baik
21.	Laptop	Asus	1	Baik

22.	Laptop	Apple	1	Baik
23.	Notebook	Soni	1	Baik
24.	Printer	Office Jet/HP	1	Baik
25.	Printer	HP	3	1 Rusak Berat
26.	Server		2	Baik
27.	Radio Access Point		1	Baik
28.	Meja Kerja Pejabat Eselon II		2	Baik
29.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal	1	Kurang Baik
30.	Meja Kerja	Lokal	11	1 Rusak Berat/10 Baik
31.	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Meeting TBL2412	1	Rusak Berat
32.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain		2	Baik
33.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Florian	1	Rusak Berat
34.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal	5	Baik
35.	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	Lokal	1	Kurang Baik
36.	Kursi Hadap Depan meja Kerja Pejabat Eselon II	London	2	Baik
37.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	Melca Credenza	1	Baik
38.	Proyektor + Attachment	Viewsino	1	Baik
39.	Proyektor + Attachment	Soni	1	Baik
40.	Microphone/Wireless Mic	Crazt	1	Baik
41.	Facsimile	Panasonic	1	Baik
42.	Pompa Air	-	1	Baik
43.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	47 Desa	47	Baik
44.	Konstruksi Pagar		1	Baik
45.	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro		1	Baik
46.	Portable Water Pump		1	Baik

### **C. Fungsi Strategis**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum memiliki Fungsi Strategis yaitu: ***Untuk Mewujudkan kemandirian Masyarakat dan otonomi Desa berwawasan Gender dan Perlindungan Anak menuju Keluarga berkualitas Tahun 2018.***

Secara singkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berfungsi:

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

### **D. Permasalahan Utama**

Adapun permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka Mewujudkan tugas dan fungsi daripada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk diselesaikan seperti masih tingginya angka kemiskinan, belum memadainya kualitas SDM aparatur pemerintah desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, rendahnya kualitas lembaga

kemasyarakatan yang ada di desa, dan masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan lembaga kemasyarakatan;
2. Tingginya angka kemiskinan;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana di desa;
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
5. Rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
6. Rendahnya kapasitas aparat pemerintah desa;
7. Kurangnya pengembangan pasar desa;
8. Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak;
9. Masih rendahnya tingkat keberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga.

## **E. Maksud dan Tujuan LKJ-IP**

### ***a. Maksud***

Penyusunan LKj-IP dimaksudkan untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKj IP ini kredibilitas OPD ini diharapkan dapat lebih baik di mata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas dalam melakukan perencanaan diberbagai bidang termasuk perencanaan penggunaan sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

## ***b. Tujuan***

Tujuan dari disusunnya LKj-IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan OPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun (2017). Penyusunan LKj-IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi guna perbaikan kinerja OPD dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap Organisasi Perangkat Daerah, LKj-IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKj-IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategic (*strategic planning*) yang diterapkan melalui rencana strategis OPD dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perencanaan strategis (*strategic planning*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang " Mewujudkan kemandirian masyarakat dan otonomi Desa berbasis kearifan lokal " yang meliputi:

1. Memberdayakan masyarakat dan pemerintah desa.
2. Menanggulangi kemiskinan.
3. Memperbaiki fungsi legislasi desa
4. Membangun sinergitas program pemberdayaan masyarakat dengan provinsi dan pusat.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada

pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategik.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan OPD dalam bentuk rencana induk (*master plan*) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan berbagai indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak) dan pemberi amanah (Bupati Sidenreng Rappang) untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan 9 program 37 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang (DPA/DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak) sebesar Rp.10,944,053,000,00,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang selanjutnya berkurang menjadi Rp 8,067,991,000,00,- (Delapan Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dalam APBD Perubahan Tahun 2017 dalam hal Belanja Tidak Langsung Khusus Gaji sebesar Rp. 2,608,188,000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) pada APBD awal dan menjadi Rp.2.620,506.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) pada APBD perubahan tahun 2017. Sedangkan pada Belanja Langsung pada tahun 2017 berkurang sebesar Rp.2,888,380,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu

Rupiah) dimana pada APBD awal sebesar Rp, 8,335,865,000,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp.5,447,485,000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh juta Empat Ratus Delapan puluh Lima Ribu Rupiah).

Adapun secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Bupati Sidenreng Rappang tahun 2017, secara lengkap terurai pada Lampiran I.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan program kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel. Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat	Persentase desa yang berstatus swakarsa	%	27	22	81
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	%	100	1	1
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = 13,30%	%	100	99.43	99.43
	Partisipasi angka kerja perempuan = 97,14%	%	100	4	4
	Persentase SKPD yang menerapkan PPRG	%	100	99.55	99.55
Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan	%	100	94.93	94.93

dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan	gender 55.56%				
Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, rasio KDRT = 0,01	%	100	42	42

Pada tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 dan Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018 ada sebanyak 5 sasaran strategis yang harus diwujudkan berdasarkan revisi RPJMD pada tahun 2014 – 2018 ini yaitu :

### 1. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat

Analisis capaian **Sasaran 1:** Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat</b>	Persentase desa yang berstatus swakarsa	%	27	22	81
<b>Rata – rata capaian (%)</b>					<b>81</b>

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari indikator kinerja utama yang mendukung sasaran strategis ini, telah mencapai target sebesar 81 persen dari daripada target pada akhir tahun RPJMD Kabupaten Sidenreng rappang.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2015	2016	2017
1	Persentase desa yang berstatus swakarsa	95	28	22
<b>Rata-rata Capaian (%)</b>		<b>95</b>	<b>28</b>	<b>22</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir maka secara umum rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dari tahun ke tahun menurun yaitu tahun 2015 sebesar 95 persen, tahun 2016 sebesar 28 persen, dan pada tahun 2017 sebesar 22 persen. Namun diharapkan pada tahun 2018 target pada akhir perencanaan atau pada akhir RPJMD kabupaten sidenreng rapping dapat tercapai.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Persentase desa yang berstatus swakarsa	%	27	48	177
<b>Rata-rata Capaian (%)</b>				<b>177</b>

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator kinerja sasaran 1 telah melebihi target jangka menengah hingga tahun 2018 (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) sebesar 177 persen.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatkan kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat ini didukung dengan adanya biaya operasional yang anggarannya bersumber dari APBD.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat ini adalah sebesar Rp 360.000.000,- dan pada APBD awal sebesar Rp 666.000.000,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp 1.233.180.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.116.737.020,- atau sebesar 90.56 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat ini adalah sebanyak 1 program dan 7 kegiatan, yaitu: program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan yaitu : Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, PNPM, Sosialisasi pedoman ADD, Penyusunan perda tentang desa,

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan.

## 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa

Analisis capaian **Sasaran 2** : Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa

### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkatkan kapasitasnya	%	14	1	7.14
<b>Rata – rata capaian (%)</b>					7.14

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2017 hanya terealisasi sebesar 7.14 persen dari target capaian pada akhir tahun perencanaan (akhir periode RPJMD kabupaten sidenreng rapping).

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2015	2016	2017
1	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	90	99.6	99.89
<b>Rata-rata Capaian (%)</b>		<b>90</b>	<b>99.6</b>	<b>99.89</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir maka secara umum rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2015 sebesar 90 persen, tahun 2016 sebesar 99,6 persen, dan pada tahun 2017 sebesar 99,89 persen dari target pada tahun 2017.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	%	100	96	96
<b>Rata-rata Capaian (%)</b>				<b>96</b>

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator kinerja sasaran 2 telah mencapai target jangka menengah hingga tahun 2018 (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) target tersebut dapat dicapai secara optimal.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa ini didukung dengan adanya biaya operasional yang anggarannya bersumber dari APBD tahun 2015, APBD 2016 dan APBD tahun 2017.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa ini adalah sebesar Rp 6.835.000.000,- dan pada APBD awal sebesar Rp 6.835.000.000,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp 2.325.086.400,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.456.606.136,- atau 62,65 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa ini

adalah sebanyak 1 program dan 5 kegiatan, yaitu: program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan yang terdiri dari kegiatan yaitu : Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, Pembinaan dan fasilitasi POKJA dan PKK desa dan kelurahan, Pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam menjadi barang produksi, Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam menjadi barang produksi, Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan POKMAS pengelolaan air bersih, Pembinaan dan vasilitasi dan kelembagaan kader/POKJA AMPL.

**3. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan**

Analisis capaian **Sasaran 3** : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan.

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan</b>	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = 13,30%	Persen	100	99.43	99.43
	Partisipasi angkatan kerja perempuan = 97,14%	Persen	100	4	4
	Persentase SKPD yang menerapkan PPRG 20%	Persen	100	99.55	99.55
	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender 55.56%	Persen	100	94.93	94.93
<b>Rata – rata capaian (%)</b>					74.49

Pada tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa untuk mencapai sasaran strategis terdapat 4 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan untuk

mendukung pencapaian sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2017. Namun keempat indikator tersebut merupakan satu kesatuan untuk mencapai sasaran strategis. Adapun capaian tersebut yang dapat direalisasikan pada tahun 2017 sebesar 4 persen dari target akhir perencanaan (akhir RPJMD kabupaten sidenreng rapping tahun 2018).

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2015	2016	2017
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = 13,30%	-	11.43	99.43
2	Partisipasi angka kerja perempuan = 97,14%	-	-	94.93
3	Persentase SKPD yang menerapkan PPRG	-	16	99.55
4	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	-	-	94.93
<b>Rata-rata Capaian (%)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97.21</b>

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 realisasi sebesar 0 persen, namun pada tahun 2017 terealisasi sebesar 94.93 persen.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = 13,30%	%	100%	99.43	99.43
Partisipasi angka kerja perempuan = 97,14%	%	100%	94.93	94.93
Persentase SKPD yang menerapkan PPRG	%	100%	99.55	99.55
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	%	100%	94.93	94.93
<b>Rata-rata Capaian (%)</b>				<b>97.21</b>

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja sampai pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar 94.93 persen dari pada target RPJMD kabupaten sidenreng rapping sebesar 100 persen pada indikator ini dan diharapkan 5.07 persen akan terealisasi pada tahun 2018.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Indikator yang mencapai target ini ditunjang oleh anggaran yang memadai pada tahun 2017 sehingga indikator dapat terealisasi sebesar 94.93 persen. Diharapkan pada tahun 2018 capaian target 100 persen pada RPJMD kabupaten sidenreng rapping dapat direalisasikan.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan adalah sebesar 31.021.000,- (tidak terjadi perubahan anggaran di APBD perubahan) dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar 30.211.000,- atau 97,39 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan ini adalah sebanyak 4 program dan 11 kegiatan, yaitu: program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan 11 kegiatan.

**4. Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan**

Analisis capaian **Sasaran 4** : Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan</b>	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	%	100	100	100
<b>Rata – rata capaian (%)</b>					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar 100 persen dari target capaian pada akhir tahun perencanaan (akhir periode RPJMD kabupaten sidenreng rapping) tahun 2018.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2015	2016	2017
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	-	-	100
<b>Rata-rata Capaian (%)</b>				<b>100</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir maka secara umum rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dari tahun ke tahun menurun yaitu tahun 2015 sebesar 0 persen, tahun 2016 sebesar 0 persen, dan pada tahun 2017 sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target pada akhir perencanaan atau pada akhir RPJMD kabupaten sidenreng rapping telah tercapai.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	%	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian (%)</b>				<b>100</b>

Jika melihat realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator kinerja sasaran 4 telah mencapai target jangka menengah hingga tahun 2018 (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) sebesar 100 persen.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Indikator yang mencapai target ini ditunjang oleh anggaran yang memadai pada tahun 2017 sehingga indikator dapat terealisasi sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian target 100 persen pada RPJMD kabupaten sidenreng rappang dapat direalisasikan.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat ini adalah sebesar Rp 360.000.000,- dan pada APBD awal sebesar Rp 47.511.000,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp 227.911.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 216.356.868,- atau sebesar 94.93 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran pemberantasan buta aksara ini adalah sebanyak 1 program yaitu Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan dan 5 kegiatan, yaitu: Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2), pemetaan potensi organisasi lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, dan evaluasi pelaksanaan PUG.

## 5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak

Analisis capaian **Sasaran 5** : Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak

### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, rasio KDRT = 0,01	%	100	96	96
<b>Rata – rata capaian (%)</b>					96

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar 96 persen dari target capaian pada akhir tahun perencanaan (akhir periode RPJMD kabupaten sidenreng rappang).

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2015	2016	2017
1	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, rasio KDRT = 0,01	-	-	96
<b>Rata-rata Capaian (%)</b>				<b>96</b>

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir maka secara umum rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dari tahun ke tahun yaitu tahun 2015 sebesar 0 persen, tahun 2016 sebesar 0 persen, dan pada tahun 2017 sebesar 96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target pada akhir perencanaan atau pada akhir RPJMD kabupaten sidenreng rapping telah tercapai.

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, rasio KDRT = 0,01	%	100	96	96
<b>Rata-rata Capaian (%)</b>				<b>96</b>

Jika melihat realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator kinerja sasaran 5 telah mencapai target jangka menengah hingga 96 persen dari (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) sebesar 100 persen.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Indikator yang mencapai target ini ditunjang oleh anggaran yang memadai pada tahun 2017 sehingga indikator dapat terealisasi sebesar 96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian target pada RPJMD kabupaten sidenreng rappang dapat dicapai.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak ini adalah sebesar Rp 50.000.000,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp 210.000.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 202.116.500,- atau sebesar 96 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran pemberantasan buta aksara ini adalah sebanyak 1 program yaitu Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak dan 2 kegiatan, yaitu: Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah, fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

**B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017, di dukung dengan anggaran sebesar Rp.8.067.991.000, Belanja Langsung sebesar Rp.5.447.485.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.620.506.000, anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp.6.661.629.225,- atau 100% informasi dari total pagu anggaran Rp.8.067.991.000. Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.1.406.361.775,- atau 17%

(lihat : Lampiran 2) Mengenai kinerja dalam hubungannya dengan tujuan dan sasaran. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang diukur menurut pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis melalui program dan kegiatan secara umum memenuhi target.

Komposisi realisasi anggaran pada tahun 2017 sebagai berikut :

1. Belanja Langsung sebesar Rp.4.209.296.889,--
2. Belanja Tidak Langsung Rp.2.452.332.336,--

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis (Per Program) sebagai berikut :

NO	SASARAN	CAPAIAN KEUANGAN PER PROGRAM			
		PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	788.276.600,-	591.143.249,-	74.9
2	Meningkatnya Mutu, Volume dan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	106.842.000,-	73.090.519,-	68
3	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Laporan Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.500.000,-	18.500.000,-	100
4	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	2.325.086.400,-	1.456.606.136,-	62.6

5	Rumah Tangga Miskin	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.	1.223.180.000,-	1.116.737.202,-	90,5
6	Pemerintah Desa dan BPD	Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	40.000.000,-	39.957.500,-	99.8
7	Status pelayanan kabupaten terhadap anak (Kab.layak anak)	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.	31.021.000,-	30.211.000,-	97.3
8	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.	227.911.000,-	216.356.868,-	94.9
9	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.	210.000.000,-	202.116.500,-	96
10	% Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah, % Partisipasi perempuan di lembaga swasta, %Partisipasi angkatan kerja perempuan, %SKPD yang menerapkan PPRG.	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.	466.668.000,-	464.578.097,-	99.5
<b>TOTAL</b>			<b>5.447.485.000,-</b>	<b>4.209.296.889,-</b>	<b>77,3%</b>

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis (Per Kegiatan) sebagai berikut :

NO	SASARAN	CAPAIAN KEUANGAN PER KEGIATAN			
		KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Tersedianya Pelengkap Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,-	900.000,-	50
2	Jasa Rekening Listrik Terbayar tepat waktu	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000,-	31.531.081,-	61.1
3	Tersedianya Jasa Jaminan Milik Daerah.	Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah.	5.316.000,-	5.211.000,-	98
4	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.900.000,-	2.243.650,-	77.3
5	Terbayarnya Honor Pegawai Negeri Sipil	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	108.065.000,-	107.277.500,-	99.2
6	Terbayarnya Jasa Cleaning Service	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23.999.000,-	23.999.999,-	100
7	Tersedianya kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	331.380.600,-	233.904.218,-	70.5
8	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	5.000.000,-	863.800,-	17.2
9	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran dan Jasa Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	258.216.000,-	185.213.000,-	71.7

10	Terlaksananya Penataan Halaman Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	68.250.000,-	59.015.550,-	86.4
11	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.672.000,-	-	0.0
13	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan/rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	26.920.000,-	14.074.969,-	52.2
14	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.500.000,-	18.500.000,-	100
15	Kelompok Masyarakat Miskin	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat	150.000.000,-	149.750.000,-	99.8
17	Terwujudnya pembinaan dan fasilitasi pokja dan kelompok PKK di desa/kelurahan.	Pembinaan dan fasilitasi Pokja dan PKK desa dan kelurahan.	550.000.000,-	502.347.886,-	91.3
18	Terselenggaranya Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam menjadi barang produksi	Pelatihan keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam menjadi barang produksi	1.030.086.400,-	335.532.650,-	32.5
19	Terlaksananya Pembinaan fasilitas kelenbagaan Pokmas pengelolaan air bersih	Pembinaan fasilitas kelenbagaan Pokmas pengelolaan air bersih	535.000.000,-	467.675.600,-	87.4
20	Terselenggaranya Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kader/Pokja AMPL	Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kader/Pokja AMPL	60.000.000,-	1.300.000,-	2.17
21	Terselesaikannya permasalahan yang di	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan	83.492.000,-	82.676.368,-	99.0

	hadapi masyarakat yang dilaporkan ke P2TP2A	perempuan (P2TP2A)			
22	Tersedianya buku profil gender	Pemetaan potensi organisasi lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	50.611.000,-	48.131.000,-	95.1
23	Tersosialisasinya GSI	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	50.400.000,-	48.200.000,-	95.6
24	% partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	35.443.000,-	31.627.000,-	89.2
25	Tersedianya data dan pelaksanaan PUG	Evaluasi Pelaksanaan PUG	7.965.000,-	5.722.500,-	71.8
26	Terlaksananya kebijakan perlindungan perempuan di kab. sidrap	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	150.000.000,-	142.504.500,-	95
27	Jumlah penyelesaian masalah hukum bagi perempuan dan anak	Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	60.000.000,-	59.612.000,-	99.3
28	Terselenggaranya Pembinaan Kelompok masyarakat membangun desa	Pembinaan Kelompok masyarakat membangun desa	245.000.000,-	244.880.000,-	99.9
29	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	94.030.000,-	92.893.520,-	98.7
30	Terlaksananya pembinaan PNPM	PNPM	57.000.000,-	13.225.000,-	23.2
31	Terselenggaranya sosialisasi pedoman pengelolaan ADD	Sosialisasi pedoman pengelolaan ADD.	55.000.000,-	54.998.750,-	100
32	Tersedianya Perda tentang Desa	Penyusunan Perda Tentang Desa.	70.000.000,-	0	0

33	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	392.150.000,-	391.489.750,-	99.8
34	Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	320.000.000,-	319.250.000,-	99.7
35	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang desa.	40.000.000,-	39.957.500,-	99.8
36	Terlaksananya kerjasama dengan organisasi perempuan	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	300.000.000,-	298.295.697,-	99.4
37	Tersesialisasi kesetaraan dan keadilan Gender serta perlindungan perempuan dan anak	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	8.668.000,-	8.668.000,-	100
38	Tersedianya fasilitasi manajemen dan pengembangan usaha bagi perempuan	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	158.000.000,-	157.614.400,-	99.7
<b>TOTAL</b>			<b>5.447.485.000,-</b>	<b>4.209.296.889,-</b>	<b>77,3%</b>

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa prosentase penyerapan anggaran pada tahun 2017 sebesar 77,3% dari target yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) koordinator yang memiliki tugas pokok untuk menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi. Pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Aparatur, sumber dana, sarana dan prasarana yang representative.

Memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dikarenakan rata-rata target Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis (PPS) dicapai 62%, dengan rincian per sasaran : Sasaran Strategis 1 tercapai 74.73%, Sasaran Strategis 2 tercapai 100% dan Sasaran Strategis 3 tercapai 100%, Sasaran ke 4 tercapai 99.89%.
2. Realisasi Anggaran sebesar Rp.6.661.629.225 (82.56%) dari Pagu Anggaran tahun 2017 Rp.8.067.991.000, \_

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sesuai penegasan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Instansi Pemerintah setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang ditempuh dan dilimpahkan kepadanya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disingkat LKj-IP untuk disampaikan kepada pimpinan pemerintahan sesuai tingkatannya.

## **B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terarah serta sinergi dan berkesinambungan melalui rencana aksi daerah sesuai Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN Tahun 2011-2015, agar masing-masing lembaga melaksanakan tugasnya secara sinergis.
2. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan atas pelaksanaan kegiatan.
3. Peningkatan fasilitas dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memaksimalkan Program di bidang Bina Pemerintahan desa, Pembangunan SDA & Usaha Ekonomi Desa, Kelembagaan dan Sosial

Budaya Masyarakat, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang, Sekian dan terima kasih.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2018  
**KEPALA DPMDPPA,**

**PATAHANGI NURDIN, S. IP**  
Pangkat. Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19691220 199009 1 002

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( PPS )**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**TAHUN 2017**

NO.	SASARAN				REALISASI	PROSENTASE	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		Pencapaian Target	RATA-RATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	- Terpenuhinya sarana administrasi perkantoran melalui kegiatan surat menyurat - <i>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</i>	Lembar	400	200	50	50
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>50</b>
2.	Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	- Informasi dan komunikasi kator berjalan lancar melalui tersedianya alat komunikasi - <i>Meningkatnya kinerja aparatur dengan tersedianya jasa komunikasi dan memudahkan komunikasi dengan instansi lainnya</i>	Bulan	12	12	100	100
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas dan operasional - Memudahkan kegiatan kedinasan	Unit	1	1	100	100
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas dan operasional - <i>Memudahkan kegiatan kedinasan</i>	Unit	8	3	38	38
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terbayarnya Honor Pegawai - <i>Meningkatnya Kinerja dan Semangat Pegawai</i>	Laporan	12	12	100	100
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
6.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tersedianya Bahan dah Alat Pembersih Serta Upah Claning Service dan Penjaga Taman - <i>Kantor Menjadi Bersih dan Nyaman</i>	Kali	12	12	100	100
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>62,8</b>
7.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	- Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Seinstansi yang terkait - <i>Teratasinya Permasalahan Setiap Kegiatan</i>	Kegiatan	100	62,8	62,8	62,8
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>63</b>
8.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	- Tersedianya administrasi Perkantoran dan jasa administrasi perkantoran - <i>Memudahkan Pekerjaan kantor</i>	Kegiatan	100	37	37	37
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>37</b>
9.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Tersedianya Administrasi Perkantoran dan Jasa Administrasi perkantoran - <i>memudahkan Pekerjaan Kantor</i>	Bulan	12	12	100	100
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Pembangunan Gedung Kantor	- Sarana dan Prasarana Aparatur	Paket	10	10	100	100
		- Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit/Set	2	0	0	0
		- Tercapainya Presentase rata-rata Kebutuhan					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>-</b>
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Tersedianya Kebutuhan Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Unit	-	-	-	-
		- Tercapainya Persentase Rata-Rata Kebutuhan Pengadaan Gedung Kantor					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>0</b>
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor	- Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Unit	-	-	-	-
		- Tercapainya Persentase Rata-rata Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>0</b>
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	1	100	100
		- Tercapainya Persentase Rata-rata Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
15	Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Buah	0	2	0	0
		- Tercapainya Persentase Rata-rata Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>0</b>
16	Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Unit	-	-	-	-
		- tercapainya Persentase Rata-rata Kebutuhan Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan gedung Kantor					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>0</b>
17	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	- Terbayarnya honor tim penyusun LAKIP, RENSTRA, RENJA, RKA/RKAP, DPA/DPPA	Laporan	4	4	100	100
		- Laporan Capaian kinerja dan keuangan selesai tepat waktu					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
18	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Terwujudnya Status pelayanan kabupaten terhadap anak (Kab.layak anak) 1. Angka kematian Bayi (AKB) 2. Angka Kematian ibu (AKI) 3. Sekolah ramah anak(SRA) 4. Taman bermain anak (TBA)	%	100	100	100	100
		- Presentase jumlah tenaga kerja di bawah umur					
		- A. % Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah					
		- B. % Partisipasi perempuan di lembaga swasta					
		- C. % Partisipasi angkatan kerja perempuan					

1	2	3	4	5	6	7	8
		-	D. % SKPD yang menerapkan PPRG				
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	- Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis bagi masyarakat	%	100	100	100	100
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
20	Pembinaan dan Fasilitasi POKJA, PKK, Desa dan Kelurahan	- Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi POKJA dan PKK Desa / Kelurahan	%	100	100	100	100
		- Terwujudnya pembinaan dan fasilitasi POKJA, PKK, Desa/ Kelurahan					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
21	Pelatihan Keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam menjadi barang produksi	- Kelembagaan Masyarakat Desa	%	100	32,6	33	33
		- Terwujudnya Kelembagaan masyarakat Desa Yang Mandiri					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>33</b>
22	Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan POKMAS Pengelolaan Air Bersih	- Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan POKMAS Pengelolaan Air Bersih	%	100	100	100	100
		- Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan POKMAS Pengelolaan Air Bersih					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
23	Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Kader/ POKJA/ AMPL	- Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Kader/ POKJA/ AMPL	%	100	100	100	100
		- Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Kader/ POKJA/ AMPL					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
24	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	- Permasalahan yang dihadapi masyarakat yang dilaporkan ke (P2TP2)	Kegiatan	100	100	100	100
		- terselesaikannya Permasalahan yang dihadapi masyarakat yang dilaporkan ke (P2TP2)					
25	Pemetaan Potensi Organisasi lembaga Masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	- Organisasi Lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan Anak	%	100	100	100	100
		- Tersedianya data Organisasi Lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan Anak					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
26	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	- Lembaga Pengarusutamaan Gender dan anak di Kab. Sidrap	%	100	100	100	100
		- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
27	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	- Lembaga Pengarusutamaan Gender dan anak di Kab. Sidrap	%	100	100	100	100
		- Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
28	Evaluasi Pelaksanaan PUG	- Data dan Informasi Pelaksanaan PUG	%	100	100	100	100
		- Tersedianya data dan Informasi Pelaksanaan PUG					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
29	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	- Terlaksananya Kebijakan perlindungan Perempuan di Kabupaten Sidrap	%	100	95	95	95
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>95</b>
30	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	- Terselenggaranya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	%	100	99	99	99

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>99</b>
31	Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	-	<del>Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa</del>	%	100	100	100
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	
32	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	Tersedianya Data dan Informasi Hasil Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada 68 Desa	Desa	68	68	100	100
		-	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada 68 Desa					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>								<b>100</b>
33	PNPM	-	Terseleenggaranya Pembinaan Proyek PNPM	Kecamatan	10	10	100	100
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>								<b>100</b>
34	Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD	-	Terlaksananya 340 Aparat Desa yang Dilatih	Orang	340	340	100	100
		-	Meningkatnya Kemampuan Aparat Desa					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>								<b>100</b>
35	Penyusunan Perda Tentang Desa	-	Tersedianya Perda tentang Desa	%	0	0	0	0
		-	Terwujudnya Penyusunan DRAP Rancangan Perda Tentang Desa					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>								<b>100</b>
36	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	-	Terlaksananya 204 Aparat pemerintah Desa yang Dilatih	%	100	100	100	100
		-	Meningkatnya Kemampuan Aparat Pemerintah Desa					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>								<b>100</b>
37	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	-	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100
		-	Terseleenggaranya Partisipasi masyarakat di dalam membangun Desa					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>								<b>100</b>
38	Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Tersedianya Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan yang memadai	%	100	100	100	100
			Terwujudnya Kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan Yang Mandiri					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>								<b>100</b>
39	Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan Tentang Desa		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan Tentang Desa	%	100	100	100	100
			Terwujudnya Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan Tentang Desa					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>								<b>100</b>
40	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan		Terlaksananya kerjasama dengan organisasi perempuan	%	100	99	99	99
			Terseleenggaranya peningkatan akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>								<b>99</b>
41	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender		Terwujudnya Kesetaraan Gender	%	100	100	100	100
			Terseleenggaranya Kegiatan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>								<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	<i>Tersedianya fasilitas bagi Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam meningkatkan Keluarga sejahtera</i>	Paket	1	1	100	100
		<i>Terlaksananya kegiatan fasilitasi bagi Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam meningkatkan Keluarga sejahtera</i>					
<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>100</b>
<b>RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN</b>							<b>79,5</b>

Mengetahui,  
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

**H. RUSDI MASSE**

Pangkejene Sidenreng, Januari 2018  
Kepala Dinas,

**PATAHANGI NURDIN, S. IP**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. : 19691220 199009 1 002











3.338,550



**RENCANA STRATEGIS (RS)**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**TAHUN 2017**

No	TUJUAN	SASARAN			
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran melalui terbinanya sistem perencanaan dan pengawasan kinerja aparatur	Terciptanya sistem kinerja aparatur pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran
2	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja	Terwujudnya mekanisme pendukung kinerja perkantoran	Tertatanya Halaman Kantor dan Mobilitas Operasional Lancar	Optimalisasi Peralatan Pendukung Kinerja	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Meningkatkan pelaksanaan Pengembangan Sistem pelaporan realisasi kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan SKPD	Terwujudnya laporan realisasi kinerja dan keuangan SKPD	Penataan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan SKPD
4	Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kelompok Masyaraktt Miskin	Pemberdayaan Masyarakat	peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
5	Mewujudkan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatakan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
6	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Pengalokasian dana desa Yang sesuai dengan aturan yang ada	Penegasan otonomi desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
		PNPM	Terlaksananya Pembinaan Proyek	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	
		Meningkatnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD	Terselenggaranya Sosialisasi pedoman Pengelolaan ADD	Terwujudnya Pemerintahan yang baik	
		Terlaksananya Penyusunan perda tentang Desa	Terlaksananya Penyusunan perda tentang desa	Terwujudnya Pemerintahan yang baik	
		Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah desa	Tersedianya SDM Pemerintah Desa di 68 Desa	terwujudnya tertib administrasi pertanggung jawaban desa	
		Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah dea dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan	

1	2	3	4	5	6
7	Meningkatnya Kapasitas aparaturn pemerintah desa	Terselenggaranya pelatihan dalam bidang manajemen pemerintah desa	Terselenggaranya pelatihan dalam bidang manajemen pemerintah desa	Terselenggaranya pelatihan dalam bidang manajemen pemerintah desa	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan desa	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan desa	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan desa	
		Terselenggaranya pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang inventarisasi kekayaan dan aset desa	Terselenggaranya pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang inventarisasi kekayaan dan aset desa	Terselenggaranya pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang inventarisasi kekayaan dan aset desa	
8	Mewujudkan Percepatan Reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, baik penegakan hukum dan pengembangan kebijakan yang pro Gender, pro poor, pro job dan pro environment	Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Pemetaan potensi organisasi lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya Pemetaan potensi organisasi lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya Pemetaan potensi organisasi lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	
		Evaluasi Pelaksanaan PUG	Tersedianya data pengarusutamaan Gender	Tersedianya data pengarusutamaan Gender secara lengkap	
9	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah	Terselenggaranya Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	Terselenggaranya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan		
10	Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terselenggaranya Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
		Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Terselenggaranya Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender		
		Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera		
11	Penyediaan Belanja Tidak Langsung	Gaji Tunjangan	Terlaksananya Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan	Terealisasinya Pembayaran Gaji & Tunjangan	Belanja Pegawai
		Tambahan Penghasilan PNS	Terlaksananya Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan	Terealisasinya Pembayaran Gaji & Tunjangan Pegawai	Belanja Pegawai

Pangkajene Sidenreng, Januari 2018

Mengetahui,  
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Kepala Dinas,

**H. RUSDI MASSE**

**PATAHANGI NURDIN, S. IP**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. : 19691220 199009 1 002

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 TAHUN : 2017

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA		REALISASI	(% )
		3	4		
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas dan Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	1.800.000	900.000	50%
		Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemakaian Listrik, Telpn & Air	51.600.000	31.531.081	61%
		Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah	5.316.000	5.211.000	98%
		Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	2.900.000	2.243.650	77%
		Tersedianya Administrasi Keuangan	108.065.000	107.277.500	99%
		Tersedianya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	23.999.000	23.999.000	100%
		Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	331.380.600	233.904.218	71%
		Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5.000.000	863.800	17%
		Tersedianya Kebutuhan akan Pelayanan Administrasi Perkantoran	258.216.000	185.213.000	72%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	68.250.000	59.015.550	86%
		Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	11.672.000	-	0%
		tercapainya prosentase rata-rata kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	26.920.000	14.074.969	52%
3	Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	18.500.000	18.500.000	100%
4	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	150.000.000	149.750.000	100%
		Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi POKJA dan PKK Desa dan Kelurahan	550.000.000	502.347.886	91%
		Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam menjadi barang produksi	1.030.086.400	335.532.650	33%
		Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan POKMAS Pengelolaan Air Bersih	535.000.000	467.675.600	87%
		Terselenggaranya Pembinaan dan fasilitasi Kelembagaan Kader/ Pokja AMPL	60.000.000	1.300.000	2%
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	245.000.000	244.880.000	100
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	94.030.000	92.893.520	99%
		Terlaksananya Proyek (PNPM).	57.000.000	13.225.000	23%
		Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD bagi Aparatur Pemerintah Desa.	55.000.000	54.998.750	100%
		Terlaksananya Penyusunan Perda Tentang Desa	70.000.000	-	0%
		Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	392.150.000	391.489.750	99,8%
		Terwujudnya Penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan	320.000.000	319.250.000	100%
6	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang desa	40.000.000	39.957.500	99,9%
7	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	83.492.000	82.676.368	99%
		Terselenggaranya Pemetaan Potensi Organisasi Lembaga Masyarakat Yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	50.611.000	48.131.000	95%
		Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	50.400.000	48.200.000	96%
		Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak	35.443.000	31.627.000	89%
		Evaluasi Pelaksanaan PUG	7.965.000	5.722.500	72%

1	2	3	4	5	6
8	- Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan	Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	150.000.000	142.504.500	95%
	- Rasio KDRT	Terselenggaranya Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	60.000.000	59.612.000	99%
9	% Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan organisasi Perempuan	300.000.000	298.295.697	99%
	% Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	8.668.000	8.668.000	100%
	% Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.021.000	30.211.000	97%
	% SKPD yang menerapkan PPRG	Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam membangun keluarga sejahtera	158.000.000	157.614.400	100%
			<b>5.447.485.000</b>	<b>4.209.296.889</b>	<b>77,3%</b>

Pangkajene Sidenreng, Januari 2018  
Kepala Dinas,

**PATAHANGI NURDIN, S. IP**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. : 19691220 199009 1 002

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
		3	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kualitas dan Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	2.250.000
		Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemakaian Listrik, Telpn & Air	70.000.000
		Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah	5.016.000
		Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	2.000.000
		Tersedianya Administrasi Keuangan	100.000.000
		Tersedianya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	13.196.000
		Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	150.000.000
		Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.000.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana & Prasarana Aparatur	3.260.000.000
		Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	34.000.000
		Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	34.000.000
		Tercapainya prosentase rata-rata kebutuhan mobileur	45.000.000
		Tercapainya prosentase rata-rata kebutuhan peralatan gedung kantor	45.000.000
		Tercapainya prosentase rata-rata kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	45.000.000
		Tercapainya Prosentase pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.000.000
		3.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Pokja PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan	500.000.000
		Terwujudnya Penguatan dan Pemanfaatan TTG	50.000.000
		Terselenggaranya Pelaksanaan gelar TTG	30.000.000
		Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitas Pos Pelayanan TTG di Kecamatan	50.000.000
		Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitas Kelembagaan kader/ Pokja AMPL	60.000.000
		Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Kelompok UKM	800.000.000
		Tersedianya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (Pemetaan komunitas)	130.000.000
		Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (KPM BZK)	150.000.000
5.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES	35.000.000
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES	45.000.000
6.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terwujudnya Pembinaan Desa/Kelurahan yang akan mengikuti lomba desa/kelurahan tingkat provinsi/pusat	180.000.000
		Tersedianya Kepala Desa Defenitif	350.000.000
		Terwujudnya penguatan kelembagaan masyarakat desa kelurahan	80.000.000
		Terselenggaranya sosialisasi pedoman pengelolaan ADD	61.000.000
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD	73.000.000
		Terlaksananya pembinaan proyek PNPB	370.000.000
		Terwujudnya peningkatan kapasitas pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat (LKMD/LPM)	85.000.000
		Terlaksananya bulan bakti gotong royong (BBGRM)	150.000.000
7.	Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan	Tersosialisasikannya Kesenjangan dan Keadilan Gender serta perlindungan Perempuan dan Anak	70.000.000
		Tersedianya Buku Profil Gender	30.000.000
8.	Meningkatnya Akses dan Keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggara pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan	Terselenggaranya Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	55.000.000
		Tersosialisasinya GSI	70.000.000
		Tersedianya data dan informasi pelaksanaan PUG	45.000.000
9.	- Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan - Rasio KDRT	Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Kab. Sidrap	30.000.000
		Jumlah penyelesaian masalah hukum bagi perempuan dan anak	30.000.000
10.	% Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah % Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta % Partisipasi Angkatan kerja Perempuan % SKPD yang menerapkan PPRG	Terlaksananya Kerjasama dengan organisasi perempuan	300.000.000
		Tersosialisasinya dan terimplementasinya PUG	8.668.000
		Tersedianya Fasilitas bagi Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam meningkatkan keluarga sejahtera	158.000.000
		Tersedianya Fasilitas Manajemen dan pengembangan usaha bagi perempuan	1.300.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>9.963.168.000</b>

Pangkajene Sidenreng , Januari 2018  
Kepala Dinas,

**PATAHANGI NURDIN, S. IP**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 19691220 199009 1 002

